

**Implementasi Permendagri Nomor 66 Tahun 2007
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa
Di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang**

Oleh :

Agung Bahtiar, Drs. R. Slamet Santoso, M. Si

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudharto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7476405

Laman :<http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Research Policy Implementation Village Development Work Plan in District Bandungan a qualitative descriptive study. This study uses the precision of a policy to explain the effectiveness of policy implementation Village Development Work Plan. The focus of this research that the Policy Implementation Village Development Work Plan in Kenteng Village District Bandungan using George Edwards III implementation model to analyze the factors in the implementation of policies that are used to determine the success of the policy implementation process. Informants in this study is from Village Head, LPM (Institute of community empowerment), BPD (Village Deliberation State), Citizens, Executive Boards dan KPM (Community Empowerment Cadres). Research and analysis process begins from the state of development, describe the implementation process by using the appropriateness of the policy to assess the effectiveness and efficiency of policies Village Development Work Plan. Furthermore, analyzing the factors implementations using George Edwards III models to be able to see the success of the implementation of the policy Village Development Work Plan. With so can find out shortcomings in the implementation process so that it can be improved so that the implementation of a policy Village Development Work Plan can run effectively and efficiently.

Keyword: Implementation , Policies Village Development Work Plan, accuracy
Policy, Implementation George Edwards III Models.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Pembangunan Desa, butuh beberapa strategi dalam penerapan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat membantu dalam penerapan reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan desa. Dalam Pasal 4 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Pada Pasal 80 ayat 1 UU Nomor 06 Tahun 2014, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan

dengan mengikutsertakan masyarakat desa agar masalah pembangunan di desa dapat terserap serta pemanfaatan potensi desa dapat dimaksimalkan.

Untuk memberikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa, maka pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan desa akan menghasilkan dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. (Utami,2012:2)

Sebagai penerapan dari sila ke-4 Pancasila, maka dalam perencanaan

pembangunan desa ditempuh melalui jalan musyawarah yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dokumen rencana itu sendiri harus memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan rencana tahunan yang harus disusun setiap tahun. Untuk menghasilkan rencana yang baik, maka harus diawali dengan proses perencanaan yang baik pula, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dalam pembangunan desa. Mengingat bahwa perencanaan merupakan langkah yang sangat vital dalam pembangunan, maka perlu perhatian khusus dalam penyusunan RKP Desa. Perencanaan ini menjadikan perencanaan pembangunan desa akan semakin mendekati proses perencanaan pembangunan yang ideal bagi struktur masyarakat desa.

Dalam pengamatan pendahuluan di desa Kenteng, peneliti menemukan masih ada masalah-masalah pembangunan desa yang belum terserap. Permasalahan pembangunan desa tersebut salah satunya di bidang pelayanan. Penulis mengamati

bahwa dalam pelayanan terhadap warga masyarakat masih banyak perangkat desa yang masih belum menguasai akan dasar-dasar komputer mengingat di jaman komputerisasi seperti sekarang ini pengetahuan akan dasar-dasar komputer sangat diperlukan terutama oleh perangkat-perangkat desa khususnya desa Kenteng karena pengetahuan tersebut sangat mempengaruhi kinerja perangkat terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut lagi dalam bidang pembangunan, proses perencanaan pembangunan juga terjadi di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Desa Kenteng sebagai salah satu unit pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan NKRI wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Penulis mengamati bahwa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Kenteng tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaannya terutama pada akomodasi aspek partisipasi masyarakat yang diantaranya meliputi : mekanisme perencanaan pembangunan dan bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT sampai pada Musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika melakukan penelitian pendahuluan di Kantor Desa bahwa data wilayah dan kependudukan di Kantor Desa sangat kurang. Data-data yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan desa diantaranya adalah sketsa desa/peta desa, kalender musim, data kependudukan, data potensi desa dan data kerawanan desa. Data-data tersebut berguna untuk mendeskripsikan keadaan desa melalui gambar-gambar maupun angka-angka yang dapat menginterpretasikan keadaan desa secara keseluruhan. Melalui data tersebut maka dapat diketahui potensi dan masalah yang ada di desa sehingga dapat dianalisis berapa besar suatu peluang dapat diusahakan dan seberapa besar suatu masalah akan menjadi ancaman. Dengan demikian, adanya perencanaan pembangunan desa diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh desa serta dapat menanggulangi masalah di desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Untuk mendapatkan data-data tersebut

dapat dilakukan melalui melalui beberapa metode perencanaan, diantaranya melalui metode PRA (participatory rural appraisal), RRA (rapid rural appraisal) dan SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) yang dapat dilaksanakan secara berkala ataupun pada saat penyusunan RPJM Desa.

Namun pada kenyataannya, sampai saat ini belum pernah dilakukan metode perencanaan PRA, RRA, maupun SWOT dikarenakan sumber daya manusia yang masih lemah, sehingga satu-satunya langkah yang ditempuh oleh Desa Kenteng dalam perencanaan pembangunan adalah melalui musrenbang desa. Pada pelaksanaan musrenbang desa, untuk menentukan prioritas dan target rencana juga sangat diperlukan data, dan tidak cukup hanya berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat, serta penggunaan prakira dapat dihindari.

Data di lapangan merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Permasalahan yang ada yakni kurangnya data-data yang diperlukan dalam perencanaan serta data yang tidak diperbaharui (tidak up to date) akan menghambat kegiatan perencanaan pembangunan tersebut.

B. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan proses implementasi Permendagri No. 66

Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada tahun 2017.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada tahun 2017.

C. Teori

Teori yang digunakan adalah:

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano, administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (dalam Pasolong, 2011: 7). Menurut Dwight Waldo dalam Pasolong (2011: 8), administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Nicholas Henry mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih

responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik (dalam Pasolong 2011: 8).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi atau penerapan adalah sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang dapat tercapai. Dalam tahap implementasi, dimana birokrat bertindak mengintervensi individu-individu anggota kelompok sasaran, ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi yaitu menerima dan menolak.

Implementasi suatu kebijakan organisasi menurut George C. Edwards dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu sebagai berikut :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi / Sikap
- d. Struktur Birokrasi.

Menurut Riant Nugroho (2014:686) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui "lima tepat" yaitu:

- a. Ketepatan Kebijakan
- b. Ketepatan Pelaksana
- c. Ketepatan Target
- d. Ketepatan Lingkungan
- e. Ketepatan Proses

3. Perencanaan Pembangunan

Conyers (1991) mengemukakan bahwa perencanaan pada hakikatnya adalah usaha secara sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif-alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, Handayani (1980) menyatakan bahwa perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan.

Sedangkan pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa (Adisasmita, 2006:30). Menurut (Siagian, 2003:4), pembangunan dapat berupa pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula pembangunan nonfisik seperti pembangunan kepribadian, mental, sikap, tingkah laku dan sebagainya. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perencanaannya.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Sumpeno, 2011:32). Dalam pembangunan desa itu sendiri terdapat berbagai usaha

peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (Soemantri, 2011:73).

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan permasalahan.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi atau wilayah

penelitian adalah di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi atau wilayah penelitian ini karena dari data mata pencaharian penduduk Desa Kenteng dapat diketahui bahwa tingkat kemakmuran hidup masyarakat Desa Kenteng menunjukkan kondisi yang tidak baik. Sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan desa, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pembangunan desa sehingga tingkat kemakmuran hidup masyarakat juga dapat meningkat.

3. Subyek Penelitian

Teknik pemilihan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan subyek penelitian atau informan yang didasarkan atas pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian adalah Kata-kata dan tindakan, Sumber Tertulis, Foto dan Data Statistik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka

6. Analisis Interpretasi Data

Alat analisis yang dapat dipakai di dalam analisis data yaitu Data Reduksi (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Concluding Drawing / Verification..

PEMBAHASAN

1. Efektifitas Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

1. Ketepatan Kebijakan

Penyusunan RKPDes yang terjadi di desa kenteng ini dirumuskan tidak sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, selain itu kurangnya perhatian terhadap potensi dan permasalahan dalam proses penyusunan RKPDes ini sehingga berdampak negatif pada pembangunan desa diantaranya : (1) pelaksanaan penyusunan rkpdes hanya ajang rutinitas belaka, (2) tidak adanya inovasi dalam pembangunan desa, karena mereka menganggap proses penyusunan RKPDes hanya sekedar rutinitas belaka (3) kurangnya ketelitian dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dengan melihat karakter permasalahan yang ada, maka dikeluarkannya kebijakan RKPDes seharusnya mampu memecahkan

permasalahan yang sedang terjadi akibat kurangnya perhatian terhadap potensi dan permasalahan dalam proses penyusunan rkpdes sehingga tidak adanya inovasi dalam program-program pembangunan. Dengan memberikan perhatian pada inovasi dan pembangunan desa maka masyarakat dapat menjadikan proses musrenbang sebagai wadah untuk menampung inovasi-inovasi untuk pembangunan desa.

2. Ketepatan Pelaksana

Di dalam kebijakan Penyusunan RKPDes ini kepala desa selaku pengambil keputusan juga sekaligus pengendali kebijakan tersebut. Selain itu aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan penyusunan rkpdes adalah Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dan seluruh jajaran yang menangani proses penyusunan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Tugas yang diberikan oleh pelaksana ditingkat bawah, diantaranya adalah menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah. Menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Akan tetapi masih banyak unsur masyarakat yang tidak mau terlibat dalam proses penyusunan RKPDes. Mereka menganggap proses penyusunan ini hanya sebagai rutinitas belaka tidak berdampak kepada pembangunan desa. Karena mereka merasa usulan mereka tidak berpengaruh terhadap proses pembangunan desa mereka sendiri. Ini menggambarkan bahwa kewenangan aktor pelaksana di tingkat bawah dalam menjalankan tugas sebagai penghubung berupa pengajuan usulan saja. Tugas yang diberikan tidak diimbangi dengan kualitas SDM dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kewenangan dari aktor pelaksana di tingkat bawah hanya sebagai mediasi, yang hanya menampung saran dari masyarakat kemudian diberikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan musrenbangdes..

3. Ketepatan Target.

Kegiatan pemasyarakatan RKPDes dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat sehingga seluruh kelompok organisasi dan seluruh kelompok masyarakat lah yang akan merasakan hasil dari proses penyusunan RKPDes ini. Seharusnya orang-orang yang berperan aktif dalam proses penyusunan RKPDes ini diantaranya LPM-Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Rukun Warga (RW) / Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun, Kepala Kampung dan Warga

Masyarakat. Dengan kata lain seluruh elemen lapisan masyarakat lah yang menjadi target dari hasil pembangunan. Dan mereka juga yang menjadi aktor dari pembangunan itu sendiri.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua elemen masyarakat menjadi aktor bagi pembangunan desanya sendiri. Mereka enggan ikut terlibat aktif dalam proses pembangunan karena mereka lebih memilih mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya sendiri daripada mengikuti proses pembangunan desa.

4. Ketepatan Lingkungan.

Interaksi yang dilakukan antar lembaga pelaksana dapat melihat hubungan keterkaitan peran dari masing-masing lembaga dalam menjalankan kebijakan penyusunan rkpdes. Kebijakan Penyusunan RKPDes di dalam menjalankan kebijakan memiliki hubungan keterkaitan lembaga pelaksana maupun dengan lembaga lain. Keterkaitan lembaga terlihat dari koordinasi yang dilakukan, antara Pemerintah Desa dengan LPM-Desa, antara Pemerintah Desa dengan BPD dan antara Pemerintah Desa dengan para Tokoh Masyarakat.

Ini menggambarkan bahwa keterkaitan lembaga pelaksana dengan lembaga lain melalui koordinasi yang dilakukan sudah sangat baik. Koordinasi sudah sebagaimana dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam pembangunan.

Jika ada intruksi dari atasan langsung ditindaklanjuti sampai bawah. Hal ini memang sudah menjadi budaya dalam birokrasi apabila ada intruksi dari atasan langsung dijalankan sampai pelaksana paling bawah yang bersinggungan dengan kelompok sasaran.

5. Ketepatan Proses.

Kenyataan dilapangan mengenai kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Penyusunan RKPDes bisa dilihat melalui pemahaman dari kelompok sasaran. Pemahaman kelompok sasaran akan proses penyusunan rkpdes tidak sama. Ada yang memaknai proses penyusunan tersebut sebagai rutinitas belaka sehingga mereka beranggapan proses penjaringan aspirasi yang dilakukan tim penyusunan rkpdes tidak penting dan hanya sebagai rutinitas belaka sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka yang kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani. Namun ada pula yang memaknainya secara tepat akan pentingnya proses penyusunan rkpdes sehingga mereka mengikuti segala proses penyusunan tersebut.

Ini menggambarkan bahwa kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Penyusunan RKPDes berbeda-beda. Kesiapan masyarakat dalam menjalankan tergantung dari pemahaman dari kelompok

sasaran. Pemahaman kelompok sasaran dalam memahami proses penyusunan tersebut dipengaruhi pola pikir. Pola pikir kelompok sasaran dalam memahami kebijakan tersebut tergantung dari kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran. Jika kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran rendah, maka kelompok sasaran menganggap proses penyusunan tersebut hanya sebagai rutinitas belaka. Oleh karena itu kelompok masyarakat tersebut tidak mengikuti semua alur proses penyusunan RKPDes.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Rkpdes Di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

1. Komunikasi.

Didalam pelaksanaan penyusunan RKPDes di Kelurahan kenteng kecamatan bandungan kabupaten semarang seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana yang diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya

terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan. Selain masyarakatnya belum sepenuhnya memiliki kesadaran mengikuti proses penyusunan RKPDes karena mereka menganggap proses penyusunan tersebut tidak menguntungkan kepada mereka secara langsung.

Ini menggambarkan bahwa adanya faktor penghambat dalam tahapan mengkomunikasikan rkpdes kepada masyarakat ini. Diantaranya adanya keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan selain itu masyarakatnya belum sepenuhnya memiliki kesadaran mengikuti proses penyusunan RKPDes.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan penyusunan RKPDes ini jumlah pelaksana yang banyak tidak dapat mendorong implementasi yang berhasil, karena para pelaksana tidak memiliki keterampilan yang memadai. Karena kurangnya personil yang memiliki keterampilan sehingga menghambat pelaksanaan penyusunan RKPDes ini. Ini menggambarkan bahwa adanya penghambat dalam kualitas aparatur desa. Faktor penghambat yang

terjadi diantaranya para pelaksana tidak memiliki keterampilan yang memadai.

Tetapi untuk masalah anggaran untuk proses penyusunan rkpdes ini nampaknya tidak menjadi kendala, karena sejak adanya dana desa masalah pendanaan untuk proses penyusunan rkpdes ini dapat teratasi. Selain itu banyak investor yang membantu proses pendanaan dalam penyusunan rkpdes ini. Ini menggambarkan bahwa adanya faktor pendorong dalam tahapan kecukupan anggaran diantaranya anggaran untuk pelaksanaan penyusunan rkpdes sudah tercukupi.

3. Disposisi

Yang terjadi dalam proses penyusunan RKPDes, tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, sehingga proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Dan dampaknya sebagian masyarakat sudah mulai bersikap tidak peduli terhadap proses penyusunan RKPDes ini. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu perlunya penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para

pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Ini menggambarkan bahwa adanya faktor penghambat dalam sikap implementor terhadap penyusunan rkpdes diantaranya tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan..

4. Struktur Birokrasi

SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana penyusunan rkpdes serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi penyusunan rkpdes. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

Ini menggambarkan bahwa adanya faktor pendorong dalam prosedur operasi ini. Dengan adanya SOP atau petunjuk

pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan penyusunan rkpdes tanpa mengurangi makna secara keseluruhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Penyusunan RKPDes

a) Kebijakan

Kurangnya perhatian terhadap potensi dan permasalahan dalam proses penyusunan rkpdes sehingga tidak adanya inovasi dalam program-program pembangunan.

b) Pelaksana

Masih banyak unsur masyarakat yang tidak mau terlibat dalam proses penyusunan RKPDes. Mereka menganggap proses penyusunan ini hanya sebagai rutinitas belaka tidak berdampak kepada pembangunan desa. Karena mereka merasa usulan mereka tidak berpengaruh terhadap proses pembangunan desa mereka sendiri.

Selain itu para petugas kurang begitu paham dengan juknis yang diberikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga fungsi mereka dalam masyarakat pun kurang optimal pelaksanaannya.

c) Target

Tidak semua elemen masyarakat menjadi aktor bagi pembangunan desanya

sendiri. Mereka enggan ikut terlibat aktif dalam proses pembangunan karena mereka lebih memilih mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya sendiri daripada mengikuti proses pembangunan desa.

Serta kelompok sasaran masih belum memahami betul terkait proses penyusunan rkpdes sehingga masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya.

d) Lingkungan

Keterkaitan lembaga pelaksana dengan lembaga lain melalui koordinasi yang dilakukan sudah sangat baik. Akan tetapi pelaksanaan pembangunan di desa terkesan lambat, program-program pembangunan membutuhkan waktu yang lebih lama dari target yang telah ditentukan sebelumnya sehingga aspirasi masyarakat yang baru seringkali tidak dijadikan prioritas karena pemerintah desa lebih memprioritaskan program-program sebelumnya yang belum selesai.

e) Proses

Pelaksana di level atas telah siap dalam menjalankan proses penyusunan RKPDes mulai pembentukan tim penyusunan sampai penetapan perdes, tetapi pelaksana level bawah dari mulai dusun belum maksimal dalam prosesnya terutama proses penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga proses pembangunan desa tidak dapat berjalan secara optimal.

2. Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyusunan RKPDes

a) Komunikasi

Masyarakatnya belum sepenuhnya memiliki kesadaran mengikuti proses penyusunan RKPDes karena mereka menganggap proses penyusunan tersebut tidak menguntungkan kepada mereka secara langsung.

Informasi yang disampaikan masih belum jelas karena mereka mempunyai kelulasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

b) Sumber Daya

Masalah anggaran untuk proses penyusunan rkpdes ini nampaknya tidak menjadi kendala, karena sejak adanya dana desa masalah pendanaan untuk proses penyusunan rkpdes ini dapat teratasi. Selain itu banyak investor yang membantu proses pendanaan dalam penyusunan rkpdes ini. Akan tetapi para pelaksana tidak memiliki keterampilan yang memadai. sehingga menghambat pelaksanaan penyusunan RKPDes.

c) Disposisi

Perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, sehingga

proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit ditambah dukungan para pejabat pelaksana masih kurang untuk proses penyusunan rkpdes ini, padahal dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam pencapaian sasaran program.

d) Struktur Birokrasi

Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan komplek membutuhkan koordinasi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang harus dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penyusunan RKPDes sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penyusunan RKPDes

a) Kebijakan

Harus diberikan perhatian yang lebih terhadap potensi dan permasalahan dalam proses penyusunan rkpdes sehingga akan menemukan sebuah inovasi dalam program-program pembangunan.

b) Pelaksana

Memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan juknis yang

diberikan dalam melaksanakan penyusunan rkpdes sehingga fungsi mereka dalam masyarakat optimal pelaksanaannya. Dan ditekankan kepada para petugas agar mereka mau mengayomi para masyarakat sehingga masyarakat memiliki sebuah kesadaran untuk mengikuti seluruh proses pembangunan.

c) Target

Berikan pemahaman kepada kelompok sasaran masyarakat terkait proses penyusunan rkpdes sehingga masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya.

d) Lingkungan

Keterkaitan lembaga pelaksana dengan lembaga lain melalui koordinasi yang dilakukan sudah sangat baik. Akan tetapi pelaksanaan pembangunan di desa terkesan lambat, program-program pembangunan membutuhkan waktu yang lebih lama dari target yang telah ditentukan sebelumnya sehingga aspirasi masyarakat yang baru seringkali tidak dijadikan prioritas karena pemerintah desa lebih memprioritaskan program-program sebelumnya yang belum selesai.

e) Proses

Pelaksana di level atas telah siap dalam menjalankan proses penyusunan RKPDes mulai pembentukan tim penyusunan sampai penetapan perdes, tetapi pelaksana level bawah dari mulai dusun belum maksimal dalam prosesnya

terutama proses penjaringan aspirasi masyarakat sehingga proses pembangunan desa tidak dapat berjalan secara optimal.

2. Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyusunan RKPDes

a) Komunikasi

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus jelas sehingga seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan penyusunan RKPDes.

b) Sumber Daya

Diharuskan para pelaksana / petugas penyusunan RKPDes memiliki keterampilan yang memadai. sehingga tidak menghambat pelaksanaan penyusunan RKPDes

c) Disposisi

Perspektif para pelaksana dengan pembuat keputusan harus disamakan, sehingga proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi mudah ditambah harus ada dukungan dari para pejabat pelaksana untuk proses penyusunan rkpdes ini, karena dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam pencapaian sasaran program.

d) Struktur Birokrasi

Para birokrat harus disamakan prioritasnya untuk mensukseskan proses penyusunan RKPDes, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi

dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks membutuhkan koordinasi

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. 2001. Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam
Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, Dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung : CV Alfabeta.
Djohani, Rianingsih (FPPM) . 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Bandung: The Asia Foundation.Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Keban, Yeremis T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Nugroho, Riant. (2014). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rustiadi, Ernan. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor: Fakultas Pertanian IPB.

Safi'i, HM. 2009. Perencanaan Pembangunan Daerah. Malang: Averroes Press.
Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bandung: Fokus Media.
Subarsono, A.G. (2012). Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Read Action and Development.
Thoah, Miftah. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber Lain

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kantor Desa Kenteng